



## Potensi Pengadopsian Model Dana Pensiun Superannuation Australia Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia

Kayla Nadisyah Wahab<sup>1</sup>, Nafisa Insani Haikiki<sup>2</sup>, Ribka Davianti Putri<sup>3</sup>

<sup>1, 2, 3</sup>Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia, Gedung M, Jl. Prof. DR. Selo Soemardjan, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Depok, 16424, Indonesia.

Received: 3 September 2024  
Revised: 14 September 2024  
Accepted: 28 September 2024

### Abstract

*Superannuation is a pension fund model that has been implemented in Australia due to its various advantages. Through this model, the welfare of Australian workers, both public employees and ordinary company employees, can be guaranteed through three main funding source schemes consisting of mandatory contributions, voluntary funds, and investment returns. In 2022, the superannuation model became one of the considerations of the Indonesian Minister of Finance, Sri Mulyani, to be adopted in Indonesia's pension funding system. This is related to several weaknesses in Indonesia's current pension scheme, which is called pay as you go. The system is quite burdensome for Civil Servants (PNS) because the contributions that must be paid are not proportional to the small amount of basic salary received, this affects the welfare of Indonesian civil servants who have entered retirement. Through the use of the literature study method with reference to the concept of pension funds and social welfare theory, it was found that the adoption of the superannuation model in Indonesia has the potential to resolve these obstacles. However, behind the potential, Indonesia also faces various challenges in terms of regulations, technological infrastructure readiness, institutions, and low civil servant salaries. Therefore, the author's suggestions are related to the strengthening of regulations, improving the quality of technological infrastructure, the effectiveness of fund management institutions, and adjusting the salaries and benefits of civil servants if they want to realize the superannuation model.*

**Keywords:** Pension Fund, Superannuation, Civil Servants, Welfare

(\*) Corresponding Author:

<sup>1</sup>[kayla.nadisyah@ui.ac.id](mailto:kayla.nadisyah@ui.ac.id), <sup>2</sup>[nafisa.insani@ui.ac.id](mailto:nafisa.insani@ui.ac.id), <sup>3</sup>[ribka.davianti@ui.ac.id](mailto:ribka.davianti@ui.ac.id)

**How to Cite:** Wahab, K., Haikiki, N., & Putri, R. (2024). Potensi Pengadopsian Model Dana Pensiun Superannuation Australia dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24.2), 632-642. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9314>

## PENDAHULUAN

Menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi salah satu hal yang cukup diidam-idamkan oleh sebagian calon pekerja di Indonesia. Hal yang melatarbelakangi minat tersebut adalah jaminan dana pensiun yang dapat dikatakan memberi keuntungan positif bagi mereka. PNS yang telah menyelesaikan tugasnya atau purna tugas pada usia 60 tahun, akan mendapatkan dana pensiun yang tidak hanya diperuntukkan pada dirinya, melainkan juga dua ahli waris yakni istri serta anak yang masih dalam masa tanggungan pensiunan PNS tersebut apabila ia meninggal dunia. Untuk jumlah dana pensiun yang diberikan, pensiunan PNS akan mendapatkan 75% dari besar gaji pokok yang nantinya diangsur tiap bulan (Suryanto, 2014). Namun pada realitanya, apakah motivasi calon pendaftar PNS yang didasari oleh jaminan dana pensiun tersebut sebanding dengan kesejahteraan yang mereka rasakan setelah pensiun? Dengan besar dana pensiun yang diperoleh, jumlah tersebut dapat dikategorikan rendah mengingat pendapatan PNS selama menjabat terhitung tak hanya dari gaji pokok, tetapi

juga tunjangan yang justru lebih besar dari gaji pokok mereka (Suryanto, 2014). Ditambah, saat ini skema pendanaan pensiun PNS yang dikenal dengan nama *pay as you go* menghadapi permasalahannya tersendiri berkaitan dengan kesejahteraan PNS dan jumlah anggaran pemerintah yang teralokasikan. Hal ini lantaran pada skema *pay as you go*, dana diambil dari iuran wajib PNS sebesar 4,75% yang terhimpun oleh PT Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen), dimana nantinya akan dilengkapi atau ditambah dana dari APBN pada saat dana pensiun mulai dicairkan. Iuran yang disetorkan tersebut dinilai memberatkan PNS karena diambil dari gaji pokok dengan timbal balik dana pensiun yang dianggap kecil (CNBC Indonesia, 2021).

Memahami kondisi kesejahteraan PNS Indonesia dari segi skema pendanaan pensiun yang diterapkan, tim penulis berusaha melihat permasalahan ini secara lebih luas. Pada hakikatnya, skema *pay as you go* di Indonesia tentu bukan merupakan satu-satunya model pendanaan pensiun yang diterapkan pada negara-negara lain di dunia. Berdasarkan indeks pensiun Global Merecer CFA Institute (MCGPI) tahun 2021, Islandia dinilai sebagai negara dengan sistem pensiun terbaik di dunia pada urutan pertama, disusul oleh Belanda, Denmark, Norwegia, Australia, dan negara-negara maju lainnya. Pada umumnya, skema dana pensiun yang mereka gunakan tidak jauh berbeda dengan Indonesia, yakni bersumber dari iuran pegawai negeri tiap bulannya, tetapi banyak dari negara-negara tersebut yang menambahkan dana sukarela, serta tidak terlalu melibatkan anggaran negara untuk menutupi kekurangan dana pensiun yang terkumpul, salah satunya di Australia dengan model dana pensiun *superannuation* (GoodStats, 2022). Dilansir dari Detik News yang terhubung dengan ABC Australia, Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu RI), Sri Mulyani pada tahun 2022 pernah mengatakan bahwa Indonesia telah menerima masukan soal skema dana pensiun Australia dan merasa bahwa hal tersebut dapat menjadi sumber stabilisasi perekonomian Indonesia yang luar biasa. Hal ini dilatarbelakangi oleh sistem pengelolaan yang baik dan implikasi model *superannuation* tersebut yang secara nyata berdampak positif terhadap kesejahteraan yang dirasakan para pegawai di sana setelah masa pensiun.

Pada dasarnya, model *superannuation* tidak sepenuhnya asing bagi Indonesia. Sistem tersebut cukup mirip dengan skema dana pensiun *fully funded* yang juga ingin diterapkan di Indonesia, yakni persentase iuran tiap bulannya yang tinggi, sebanding dengan penerimaan dana pensiun secara pribadi yang tinggi pula. Hal yang membedakan adalah pada *superannuation*, beberapa perusahaan khusus yang menjadi pengelola dana pensiun melakukan investasi dari dana pensiun yang terhimpun, alhasil dana tersebut dapat berkembang. Di Australia, model ini juga dianggap memudahkan para pegawai lantaran apabila pindah bekerja, dana tetap dapat berlanjut sehingga menjamin ketenangan dan keamanan bagi pegawai. Salah satu warga asal Indonesia yang telah lama bekerja di Melbourne, Australia dan kini sudah pensiun mengatakan bahwa dana pensiun *superannuation* sangat memudahkan hidupnya lantaran apabila hanya mengandalkan pensiunan dari pemerintah, hal tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhannya setelah pensiun (Detik News, 2022).

Indonesia memang mempertimbangkan adopsi penerapan *superannuation* sebagai skema dana pensiun PNS, tetapi tentu dibalik berbagai potensi positif yang mungkin terjadi, beberapa tantangan juga tak dapat dihindarkan. Hal yang sangat perlu diperhatikan yakni mengenai sistem kepegawaian Indonesia yang tentu memiliki perbedaan dengan sistem yang dijalankan di Australia. Selain itu, karena salah satu pertimbangan Indonesia menerapkan *superannuation* juga lantaran pengeluaran APBN untuk menutupi dana pensiun yang semakin lama kian membengkak, potensi dampak

positif penekanan anggaran sangat perlu untuk dilihat perkembangannya. Untuk itu melalui analisis yang dilakukan, tim penulis hendak mengetahui bagaimana model dana pensiun *superannuation* yang dianggap unggul sekaligus berhasil menyejahterakan pegawai Australia dapat berpengaruh positif pula pada kesejahteraan PNS apabila diterapkan di Indonesia, melihat dari berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi.

## **KERANGKA TEORI**

### **Dana Pensiun**

Dana pensiun adalah sebuah investasi yang dikelola oleh perusahaan dan pemberi kerja lainnya untuk membayar jumlah tahunan yang diperlukan sesuai dengan skema pensiun bisnis atau organisasi (Perry, 1983). Berdasarkan pengertian ini, disimpulkan bahwasanya dana pensiun ialah organisasi atau entitas legal yang bertanggung jawab mengelola program pensiun dengan tujuan supaya memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan, terutama bagi mereka yang telah memasuki masa pensiun (Mustafidah & Fauzi, 2013:24). Terakhir, menurut Malinda (2007), dana pensiun adalah sejumlah dana yang disiapkan oleh seseorang atau lembaga untuk kepentingan seseorang pada saat ia tidak lagi bekerja. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa dana pensiun adalah kumpulan dana yang dikumpulkan secara khusus dengan tujuan memberikan manfaat kepada karyawan ketika mereka mencapai usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat.

### **Kesejahteraan Sosial**

Kesejahteraan sosial adalah salah satu hak fundamental yang dimiliki oleh setiap individu. Aspek ini juga sangat penting dalam pembangunan nasional karena keberadaan kesejahteraan sosial menandakan bahwa negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial mencakup rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (Ginting & Herdiyana, 2020). Dana pensiun dapat termasuk dalam kategori jaminan sosial. Jaminan sosial adalah sistem perlindungan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau badan lainnya untuk memberikan perlindungan finansial atau manfaat kepada individu atau keluarga dalam situasi tertentu, seperti pensiun, cacat, atau kematian (Muthoharoh & Wibowo, 2020). Dana pensiun yang sering kali diselenggarakan oleh pemerintah atau perusahaan bertujuan untuk memberikan pendapatan kepada individu setelah mereka pensiun dari pekerjaan mereka, sehingga dapat membantu memastikan kesejahteraan finansial mereka di masa pensiun.

### ***Superannuation***

*Superannuation* adalah sistem wajib di mana persentase minimum dari pendapatan ditempatkan ke dalam dana untuk mendukung kebutuhan finansial saat pensiun. Dana super diinvestasikan dalam berbagai aset untuk membantu meningkatkan saldo, sehingga hasil pensiun yang optimal dapat dicapai (australiansuper.com, 2024). Penduduk lanjut usia menerima pensiun (*age pension*) dari sistem asuransi wajib yang dikenal sebagai *superannuation* (Al Asyari & Budiarsih, 2022). Dapat disimpulkan bahwa *superannuation* adalah sistem pensiun yang diwajibkan di Australia, di mana sebagian dari pendapatan seseorang secara rutin disisihkan dan diinvestasikan untuk mendukung kehidupan finansial mereka setelah pensiun. Ini memastikan bahwa individu memiliki tabungan yang mencukupi untuk menikmati pensiun dengan nyaman.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur atau tinjauan pustaka. Dalam melakukan pengumpulan data penulis mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan dana pensiun, *superannuation*, dan kesejahteraan sosial melalui data-data pendukung yang bersumber dari jurnal penelitian baik nasional maupun internasional, buku-buku penunjang, surat kabar elektronik, *website* dan majalah.

### **Keunggulan Skema Dana Pensiun Australia melalui Model *Superannuation***

Penggunaan model dana pensiun *Superannuation* telah sangat lama diadopsi oleh Australia, tepatnya dari tahun 1980-an. Hingga kini, model tersebut masih terus diterapkan lantaran memberikan manfaat bagi pegawai negeri hingga pegawai perusahaan besar dalam hal pengelolaan dana pensiun (Detik News, 2022). Melalui model *superannuation*, manfaat yang dirasakan tidak hanya bertumpu pada pegawai saja, tetapi juga berdampak pada pemerintahan Australia lantaran hal tersebut berhasil mengurangi tekanan finansial pemerintah. Tiga sumber utama dana pensiun pada model ini diantaranya iuran wajib, dana sukarela, serta hasil dari investasi yang dilakukan oleh pengusaha selaku penghimpun dana yang diberikan oleh pegawai pada masa kerjanya. Kemudian, wajib bagi perusahaan untuk memberikan dana pensiun yang telah terhimpun kepada pensiunan pegawai tiap triwulan dengan konsekuensi berupa pengenaan *Super Guarantee Charge* (SGC) apabila pemberian dana tidak terlaksana dengan baik oleh perusahaan yang bersangkutan. Pada model ini pula, terdapat *MySuper* sebagai bentuk investasi opsional yang dapat dimanfaatkan oleh pegawai dengan pengelolaan dana oleh perusahaan tempat pegawai tersebut menyetorkan iurannya. Selain dengan bantuan *MySuper*, pegawai juga dapat mengelola dana pensiun mereka secara mandiri melalui skema *Self-Managed Super Fund* (SMSF). Pada skema tersebut, pegawai memiliki hak dalam hal mengambil keputusan investasi serta pengelolaannya, hingga perencanaan mengenai warisan dana pensiun (Nagar, V. 2021).

Seperti yang juga telah disebutkan, *superannuation* merupakan model dana pensiun yang sudah diterapkan hingga puluhan tahun di Australia. Salah satu tokoh terkemuka berdarah Irish–Australia, Fitzgerald (1993) menjelaskan bahwa *superannuation* menjadi penting dan dapat dikatakan unggul karena dengan melakukan kegiatan sejenis tabungan nasional, hal ini dapat berimplikasi positif terhadap terminimalisirnya utang luar negeri dan persiapan diri dalam menghadapi populasi yang semakin menua. Melihat pada cakupan yang lebih spesifik, Fitzgerald juga memberikan argumen pendukungnya mengenai keberadaan dana pensiun *superannuation*. Beliau merasa bahwa model dana pensiun tersebut dapat mendorong kesetaraan antargenerasi dalam menghadapi penuaan populasi, melawan keengganan menabung untuk masa pensiun, hingga memperbaiki kegagalan pengelolaan dana yang pernah terjadi pada masa lalu sehingga dapat dioptimalkan pada masa ini (Kingston & Thorp, 2018). Di banyak rumah tangga yang mendekati atau telah memasuki masa pensiunnya, dana pensiun menjadi sumber pendapatan yang penting, bahkan memegang sebagian besar pendapatan yang membiayai kehidupan sehari-hari mereka (Asher, et al. 2017).

Berdasarkan data yang dilaporkan oleh ASFA (*The Association of Superannuation Funds of Australia Limited*) selaku organisasi nirlaba yang menjalankan misinya sebagai penjaga kualitas sistem dana pensiun di Australia, *superannuation* dinilai meningkatkan kekayaan rumah tangga Australia secara keseluruhan. Dana pensiun yang ada saat ini berkontribusi pada kekayaan rumah tangga yang masuk ke dalam posisi terkaya secara rata-rata, serta mengurangi ketimpangan kekayaan di kalangan masyarakat Australia. Keunggulan lainnya dengan

penerapan model dana pensiun *superannuation* adalah untuk pegawai yang merupakan kepala rumah tangga dan masih bekerja, kontribusi lebih lanjut dan hasil investasi yang dikembangkan akan membantu meningkatkan saldo dana pensiun rumah tangga di kemudian hari. Selain itu terdapat pula data dari OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) yang kurang lebih mendukung pernyataan pada paragraf sebelumnya, yakni bahwa apabila dirata-ratakan, rumah tangga Australia memiliki tingkat kekayaan bersih yang relatif tinggi dibandingkan negara maju lainnya. Organisasi tersebut pun menambahkan, dengan dimasukkannya tabungan pensiun kepada perusahaan swasta dalam ukuran kekayaan rumah tangga, hal tersebut menjadikan ketimpangan kekayaan di antara rumah tangga Australia menjadi salah satu yang terendah di kelompok negara maju (ASFA, 2020). Kemudian, dilansir dari Laman *Morning Star Australia* (2024), hingga saat ini pemerintah Australia mendukung dana pensiun *superannuation* mengingat harapan hidup masyarakat yang tinggi di negara tersebut tidak sebanding dengan banyaknya penambahan usia kerja. Untuk menjamin kesejahteraan pensiunan lanjut usia, *superannuation* menjadi model dana pensiun yang paling dibutuhkan.

### **Dampak Potensial Skema Superannuation terhadap Kesejahteraan PNS Indonesia**

Adopsi skema *superannuation* di Indonesia mempunyai potensi memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan dan persiapan pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS). Salah satu manfaat utamanya adalah peningkatan akumulasi dana pensiun, dengan kontribusi dari pemberi kerja dan pengembalian investasi yang lebih tinggi dapat meningkatkan saldo pensiun PNS. Keamanan finansial jangka panjang juga dijamin, sehingga dana pensiun tidak akan habis sebelum pensiun berakhir, memberikan aliran pendapatan yang stabil selama masa pensiun. Fleksibilitas dalam pengelolaan investasi memungkinkan PNS untuk memilih jenis investasi sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan mereka, yang dapat meningkatkan kesejahteraan finansial di masa pensiun (Nevil, 2023).

Adopsi skema ini juga dapat mengurangi beban fiskal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan mengalihkan sebagian beban pensiun ke skema yang didukung kontribusi pemberi kerja. Dukungan pemerintah dan insentif tambahan dapat mendorong PNS untuk menambah kontribusi mereka ke dalam dana *superannuation*, dengan memberikan insentif seperti pengurangan pajak untuk kontribusi sukarela. Skema *superannuation* menawarkan solusi yang lebih berkelanjutan dan stabil secara finansial dibandingkan dengan sistem pensiun yang bergantung sepenuhnya pada APBN, dengan kontribusi dari pemberi kerja dan pengelolaan investasi yang efisien (Novalianto et al, 2023).

Partisipasi aktif dari PNS dalam perencanaan dan pengelolaan pensiun mereka didorong oleh skema ini, sehingga mereka dapat merasa lebih bertanggung jawab dan terlibat dalam mempersiapkan masa pensiun mereka. Efisiensi administratif juga menjadi manfaat lain dari skema *superannuation*, dengan sistem yang terstruktur dapat meningkatkan efisiensi administrasi dan manajemen dana pensiun. Risiko gagal bayar pensiun dapat diminimalkan dengan skema yang mengintegrasikan kontribusi dari pemberi kerja dan investasi yang terdiversifikasi, memberikan jaminan lebih besar bagi PNS akan menerima manfaat pensiun yang telah dijanjikan (CTwealth).

Dari potensi dampak-dampak tersebut adopsi skema *superannuation* di Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan finansial PNS secara signifikan. Namun, keberhasilan implementasinya bergantung pada kesiapan regulasi, edukasi bagi PNS, dan manajemen risiko yang efektif. Pengalaman dari negara

lain seperti Australia menunjukkan bahwa dengan dukungan dan manajemen yang tepat, skema *superannuation* dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi peserta dan pemerintah.

### **Tantangan dalam Menerapkan Skema Superannuation pada PNS Indonesia**

Upaya untuk mensejahterakan PNS yang pensiun di Indonesia masih terus dilakukan oleh pemerintah, tetapi tidak dapat dipungkiri dalam implementasinya, pemerintah masih menghadapi hambatan-hambatan yang sifatnya fundamental. Dengan mengetahui apa saja tantangan yang dihadapi akan sangat membantu dalam merancang solusi atau alternatif perbaikan skema pensiun ke depannya. Superannuation atau dana manfaat pensiun, saat ini telah digunakan oleh Australia untuk para pekerja di negaranya. Skema pensiun ini rencananya akan diperkenalkan ke pemerintah Indonesia untuk membantu menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan hasil telaah referensi berupa jurnal dan berita, terdapat beberapa tantangan utama dalam menerapkan skema superannuation seperti di Australia jika diterapkan pada PNS Indonesia, sebagai berikut :

#### a) Regulasi dan pengawasan

Salah satu tantangan utama adalah penyesuaian regulasi dan pengawasan yang ada. Skema *superannuation* di Australia memiliki kerangka hukum dan regulasi yang berbeda dengan sistem pensiun di Indonesia. Skema *superannuation* di Australia diatur oleh berbagai peraturan dan lembaga pengawasan yang bertujuan untuk memastikan keamanan dan efisiensi pengelolaan dana pensiun. Berikut adalah gambaran mengenai regulasi dan kebijakan yang mengatur skema *superannuation* :

- 1) *Superannuation Guarantee (Administration) Act 1992*, Undang-undang ini mengatur kontribusi wajib yang harus dibayar oleh pemberi kerja ke dalam akun superannuation karyawan.
- 2) *Superannuation Industry (Supervision) Act 1993* (SIS Act), Undang-undang ini memastikan bahwa dana dikelola dengan aman dan sesuai dengan kepentingan para anggotanya.

Dari regulasi diatas, Australia memiliki regulasi dan pengawasan yang jelas mengatur tentang skema dana pensiun. Sedangkan di Indonesia sendiri, regulasi yang mengatur pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dalam :

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang mengatur tentang manajemen ASN termasuk ketentuan pensiun.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang mencakup manajemen PNS, termasuk pension.
- 3) Peraturan perundang-undangan yang ada hanya mengatur manajemen dan ketentuan pensiun.

Dari beberapa peraturan Undang-Undang diatas, terbukti bahwa Indonesia hanya memiliki regulasi yang mengatur tentang manajemen dan ketentuan pensiun, tetapi untuk regulasi yang mengatur tentang dana pensiun PNS, Indonesia belum memilikinya (Putra, 2022). Oleh karena itu, jika ingin mengadopsi skema seperti *superannuation* dari Australia, diperlukan undang-undang dan peraturan khusus yang mengatur dana pensiun di Indonesia dan regulasi yang memastikan transparansi dan kepatuhan dari pengelola dana pensiun, termasuk pengungkapan informasi yang jujur dan adil kepada peserta. Sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani, bahwa hingga saat ini belum adanya UU yang membahas mengenai dana pensiun untuk PNS di Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya adopsi *superannuation* hal ini

dapat menjadi salah satu prioritas untuk mendorong reformasi kebijakan pensiun di Indonesia (Putra, 2022).

#### b) Infrastruktur Teknologi

Implementasi skema *superannuation* membutuhkan sarana teknologi informasi yang canggih untuk mengelola dana pensiun dengan efisien. Skema ini difasilitasi aplikasi pendukung yang diberi nama AustralianSuper dimana Sebagian besar pekerja di Australia memiliki akun super dengan tujuan untuk membantu warga Australia menghemat uang yang dapat mereka gunakan di masa pensiun (Wang, 2021), Sedangkan di Indonesia sendiri skema dana pensiun PNS diserahkan setiap bulan ke rekening masing-masing dan dikelola oleh PT Taspen (Persero) (Aditya, 2022).

Tantangan yang terjadi dalam hal ini salah satunya yaitu infrastruktur teknologi informasi yang kurang memadai, banyak instansi di Indonesia yang masih menggunakan sistem teknologi yang kurang terintegritas, hal ini menyebabkan kesulitan dalam pengumpulan, mengelola, dan pembaruan data PNS. Keterbatasan akses internet yang stabil dan masif di beberapa daerah juga menjadi kendala, terutama di wilayah terpencil. Menerapkan skema *superannuation* memerlukan integrasi data dari berbagai sumber, seperti data kepegawaian, data pembayaran gaji, dan data personalia lainnya. Kurangnya interoperabilitas antar sistem yang digunakan oleh berbagai instansi pemerintah bisa menghambat proses ini. Selain itu, tidak semua PNS memiliki tingkat literasi teknologi yang memadai untuk beradaptasi dengan sistem baru yang berbasis teknologi.

#### c) Lembaga Pengelolaan Dana

Lembaga yang mengelola dana dalam skema *superannuation* di Australia memiliki peran yang krusial dalam memastikan keamanan dan pertumbuhan dana pensiun bagi para anggotanya. Berikut adalah beberapa lembaga utama yang terlibat dalam pengelolaan dana *superannuation* di Australia:

1. Australian Prudential Regulation Authority (APRA): APRA adalah badan pengawas utama yang mengatur *superannuation* fund di Australia. APRA memastikan bahwa dana pensiun dikelola dengan baik dan memenuhi standar keuangan yang ketat. (APRA, 2024).
2. Australian Securities and Investments Commission (ASIC): ASIC bertanggung jawab Mengatur perilaku pasar dan melindungi konsumen *superannuation* dari praktik yang tidak adil atau menyesatkan. ASIC juga mengawasi penasihat keuangan yang memberikan nasihat tentang *superannuation* (Deloitte, 2024)
3. Australian Taxation Office (ATO): ATO membantu individu mengkonsolidasikan akun *superannuation* mereka untuk menghindari biaya ganda dan memaksimalkan penghematan mereka untuk pensiun. (Wikipedia, 2024)

Jika melihat lembaga pengelolaan dana di atas, Australia memiliki badan pengawas seperti APRA dan ASIC yang memiliki peran jelas dalam mengawasi dana pensiun dan perilaku pasar. Sedangkan, penerapan skema *superannuation* pada PNS di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan signifikan, terutama terkait lembaga pengelolaan dana. Tantangan utama yang dihadapi meliputi regulasi dan kebijakan yang kurang jelas, kapasitas lembaga pengelola, serta transparansi dan akuntabilitas. Pertama, regulasi dan kebijakan yang mendukung operasional lembaga pengelola dana pensiun sering kali kurang lengkap, menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaan dan pengawasan skema *superannuation*, serta tantangan harmonisasi antara berbagai regulasi yang ada. Kedua, lembaga pengelola dana pensiun di Indonesia membutuhkan tenaga ahli dengan pengetahuan mendalam tentang manajemen investasi, aktuaria, dan

pengelolaan risiko, namun kurangnya sumber daya manusia yang terampil dan berpengalaman sering kali menghambat kinerja lembaga tersebut. Selain itu, kapasitas operasional lembaga pengelola juga sering terbatas, terutama dalam hal infrastruktur, teknologi, dan prosedur manajemen risiko yang canggih. Ketiga, transparansi dan akuntabilitas menjadi krusial, dimana lembaga pengelola dana pensiun harus memastikan adanya mekanisme pengawasan dan kontrol internal yang kuat untuk menghindari penyalahgunaan dana, serta pelaporan yang akurat dan tepat waktu kepada pemangku kepentingan dan PNS untuk membangun kepercayaan dan memastikan keberlanjutan skema.

#### d) Rendahnya Upah Gaji PNS

Upah gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang rendah merupakan isu yang sering dibicarakan, terutama terkait dengan kesejahteraan dan motivasi kerja para pegawai negeri. Program pensiun PNS pada saat ini menggunakan skema manfaat pasti (*defined benefit*) dengan besaran 2,5 persen untuk setiap tahun akumulasi masa kerja dari gaji pokok terakhir dengan manfaat maksimal sebesar 75 persen gaji pokok terakhir (Rachman, 2023). Pada saat ini, pembiayaan pensiun PNS seluruhnya berasal dari APBN walaupun setiap bulan PNS masih memberikan iuran sebesar 4,75% dari gaji pokok. Sebagian besar beranggapan bahwa bahwa gaji PNS relatif rendah, baik dibandingkan dengan kebutuhan untuk hidup layak maupun dibandingkan dengan gaji yang diterima oleh pegawai-pegawai lainnya, seperti yang bekerja pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D) maupun para pegawai swasta lainnya. Kondisi yang demikian tentu saja akan berpengaruh terhadap kondisi kesejahteraan PNS termasuk di masa pensiun nanti.

Sistem penggajian PNS sebagai tuntutan setiap PNS maupun keluarganya, yang meliputi gaji pokok maupun tunjangan-tunjangan lainnya guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari secara layak, terutama bagi PNS dengan gaji pokok paling rendah, sistem ini belum mampu meningkatkan kesejahteraan mereka dan justru membuat mereka semakin kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Ditambah gaji PNS yang rendah saat ini, implementasi skema *superannuation* memang bisa menjadi tantangan yang cukup besar. Gaji yang cenderung rendah dapat menyulitkan PNS untuk memberikan kontribusi yang cukup besar ke dalam dana pensiun mereka. Meski demikian, pemerintah tetap perlu untuk mempertimbangkan pendekatan ini kedepannya. Manfaat jangka panjang dari skema *superannuation* dapat menjadi insentif bagi PNS untuk tetap memperjuangkan persiapan pensiun yang lebih baik, sementara pemerintah dapat menyusun kebijakan yang tepat dan mungkin meninjau struktur gaji PNS guna menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi implementasi skema ini.

Gaji Pokok PNS	Gaji PNS Sebelum Kenaikan	Kisaran Gaji (Dengan Kenaikan 8%)
Golongan I	Rp 1560800- Rp 2686500	Rp 1685664- Rp 2901420
Golongan II	Rp 2022200- Rp 3820000	Rp 2183976- Rp 4125600
Golongan III	Rp 2579400- Rp 4797000	Rp 2785752- Rp 5180760
Golongan IV	Rp 3044300- Rp 5901200	Rp 3287844- Rp 6373296

Gambar 1. Tabel rincian gaji PNS (sumber : CNBC Indonesia, 2023)

## KESIMPULAN

Skema dana pensiun *superannuation* di Australia, yang telah diterapkan sejak 1980-an, memberikan banyak manfaat baik bagi pegawai maupun pemerintah. Sistem ini didukung oleh iuran wajib, kontribusi sukarela, dan hasil investasi yang diatur secara

ketat oleh berbagai undang-undang serta diawasi oleh , seperti APRA dan ASIC. Melalui model ini, pegawai bisa mengelola dana pensiun mereka secara mandiri melalui SMSF atau mendapatkan bantuan pengelolaan investasi melalui MySuper. *Superannuation* berhasil mengurangi beban finansial pemerintah, meningkatkan kesejahteraan finansial rumah tangga Australia, serta mengurangi ketimpangan kekayaan.

Adopsi skema *superannuation* di Indonesia memiliki potensi signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan dan persiapan pensiun PNS melalui peningkatan akumulasi dana pensiun, kontribusi pemberi kerja, dan pengembalian investasi yang lebih tinggi, dimana hal tersebut menjamin keamanan finansial jangka panjang dan aliran pendapatan stabil selama masa pensiun. Skema ini juga dapat mengurangi beban fiskal pada APBN dengan mengalihkan sebagian beban pensiun ke skema berbasis kontribusi dan investasi yang efisien. Namun, tantangan utama yang perlu diatasi mencakup penyesuaian regulasi dan pengawasan, pengembangan infrastruktur teknologi, penguatan lembaga pengelola dana, serta gaji PNS yang masih terhitung rendah. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, Indonesia dapat diprediksi berhasil mengadopsi skema *superannuation*, memberikan keamanan finansial yang lebih besar bagi PNS dan mengurangi beban fiskal pemerintah dalam jangka panjang.

## **SARAN**

Dari tantangan-tantangan yang ada untuk penerapan skema *superannuation* di Indonesia, maka saran yang dapat diberikan dan dipertimbangkan, yakni :

### **1. Penguatan Regulasi dan Pengawasan**

Indonesia perlu menyusun undang-undang khusus yang mengatur dana pensiun PNS secara komprehensif, seperti *Superannuation Guarantee (Administration) Act* dan *Superannuation Industry (Supervision) Act* di Australia, yang mencakup aspek kontribusi wajib, pengelolaan dana, serta perlindungan hak peserta. Selain itu, perlu didirikan lembaga pengawas independen seperti APRA dan ASIC di Australia, yang memiliki wewenang untuk mengawasi dana pensiun, menetapkan standar manajemen risiko, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana harus dijamin melalui mekanisme pelaporan yang jelas dan terbuka, dengan informasi yang relevan disampaikan secara rutin kepada peserta pensiun untuk membangun kepercayaan.

### **2. Peningkatan Infrastruktur Teknologi**

Indonesia perlu mengembangkan sistem IT yang terintegrasi untuk pengelolaan dana pensiun, yang mampu mengelola data kepegawaian, pembayaran gaji, dan informasi personalia lainnya secara efisien, serta mendukung keamanan siber yang kuat untuk melindungi data dan transaksi. Selain itu, memperluas akses internet yang stabil ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil, serta meningkatkan literasi teknologi di kalangan PNS melalui pelatihan, sangat penting untuk mendukung implementasi skema *superannuation*.

### **3. Pembentukan dan Penguatan Lembaga Pengelolaan Dana**

Indonesia perlu membentuk lembaga khusus yang berfungsi seperti APRA di Australia, dengan fokus pada pengelolaan dan pengawasan dana pensiun PNS, dilengkapi dengan tenaga ahli dalam bidang manajemen investasi, aktuaria, dan pengelolaan risiko. Selain itu, perlu juga untuk melakukan investasi dalam pengembangan kapasitas operasional lembaga pengelola, termasuk infrastruktur, teknologi, dan prosedur manajemen risiko, serta memastikan pelatihan dan

pengembangan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Mekanisme pengawasan dan kontrol internal yang ketat harus ditetapkan untuk menghindari penyalahgunaan dana, dengan sistem audit rutin dan pelaporan yang akurat kepada pemangku kepentingan sebagai bagian dari prosedur operasional.

#### 4. Revisi Struktur dan Tunjangan PNS

Pemerintah perlu meninjau kembali dan merevisi struktur gaji dan tunjangan PNS untuk memastikan upah yang lebih layak dan kompetitif. Hal ini meliputi penyesuaian gaji pokok agar lebih sejalan dengan kebutuhan hidup layak dan standar industri lainnya, seperti BUMN dan sektor swasta. Selain itu, pemerintah dapat meningkatkan berbagai tunjangan, seperti tunjangan kinerja, tunjangan risiko, dan tunjangan daerah terpencil, serta memperkenalkan insentif tambahan untuk meningkatkan total kompensasi yang diterima oleh PNS. Revisi ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan PNS selama masa kerja, tetapi juga memungkinkan mereka untuk memberikan kontribusi yang lebih besar ke dalam dana pensiun, mendukung implementasi skema *superannuation* dengan lebih efektif.

### DAFTAR PUSTAKA

- ABC Australia. (2022, September 6). *Mengenal Dana Pensiun di Australia yang Dilirik untuk Diterapkan di RI*. Wikipedia. Retrieved May 21, 2024, from <https://news.detik.com/abc-australia/d-6275096/mengenal-dana-pensiun-di-australia-yang-dilirik-untuk-diterapkan-di-ri>
- Al Asyari, S. V. U., & Budiarsih, B. (2022). Analisis Kewajiban Kepesertaan Sistem Bpjs Kesehatan. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(1), 446-467.
- Alifah, N. N. (2022, Maret 14). *10 Negara dengan Sistem Pensiun Terbaik di Dunia, Indonesia Peringkat Berapa?* Wikipedia. Retrieved May 21, 2024, from <https://goodstats.id/article/10-negara-dengan-sistem-pensiun-terbaik-di-dunia-indonesia-peringkat-berapa-qT37A>
- APRA. (2024). *Register of superannuation institutions*. <https://www.apra.gov.au/register-of-superannuation-institutions>.
- Asmara, C. G. (2021, April 14). *Pensiunan PNS Bakal Sejahtera di Masa Tua karena Ada Ini!* Wikipedia. Retrieved May 21, 2024, from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210414083733-4-237661/pensiunan-pns-bakal-sejahtera-di-masa-tua-karena-ada-ini/2>
- Australian Super. 2024. Superannuation <https://www.australiansuper.com/superannuation>
- CTWealth. (n.d.). *PSS Member Frequently Asked Questions*. CTWealth. Retrieved May 12, 2024, from <https://www.ctwealth.com.au/pss-member-frequently-asked-questions/>
- Deloitte. (2024). *Superannuation*. <https://www.deloitte.com/au/en/Industries/investment-management/perspectives/superannuation.html>
- Ginting, M. L. B., & Herdiyana, R. (2020). Peran pemerintah pada kebijakan kartu prakerja dalam memulihkan kesejahteraan pekerja di masa pandemi Covid-19. *Jurnal Analisis Kebijakan*, 4(2), 1-15.
- Gruber, J. (2024, January 4). *Why the Government will continue to target super and the pension*. Morningstar Australia. Retrieved May 21, 2024, from

- <https://www.morningstar.com.au/insights/retirement/244473/why-the-government-will-continue-to-target-super-and-the-pension>
- Kingston, G., & Throp, S. (2018). Superannuation in Australia: A Survey of the Literature. *Economic Record, Economic Society of Australia*, 3-7. 10.1111/1475-4932.12443
- Mustafidah, W., & Fauzi, A. N. (2023). ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN LEMBAGA DANA PENSIUN SYARIAH SEBELUM DAN SELAMA PANDEMI COVID-19. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 4(1), 22-44.
- Nagar, V. (2021). Examining Portfolio Diversification and Good Governance in Developed, Emerging and Frontier Markets for Australian Superannuation Funds. *Swinburne University of Technology Faculty of Business and Law Swinburne Business School*, 14-21.
- Nevil, S. (2023). *Superannuation: What It Is, How It Works, Types of Plans*. Investopedia. Retrieved May 12, 2024, from <https://www.investopedia.com/terms/s/superannuation.asp>
- Novalianto, R. D., Wijaya, E., & Daniel, C. G. (2023). *Optimalisasi Dana Pensiun untuk Pembangunan Infrastruktur di Indonesia* (Vol. 1). IIGF Institute. <https://www.scribd.com/document/703852917/Buku-1-Optimalisasi-Dana-Pensiun-Untuk-Pembangunan-Infrastruktur-Di-Indonesia>
- Putra, D. A. (2020). Mengenal Superannuation, Skema Dana Pensiun di Australia. <https://tirto.id/mengenal-superannuation-skema-dana-pensiun-di-australia-gvvj>
- Putra, D. A. (2020). Sri Mulyani Terima Masukan Skema Dana Pensiun dari Australia. <https://tirto.id/sri-mulyani-terima-masukan-skema-dana-pensiun-dari-australia-gvvc>.
- Rachman, A. (2023). *Skema Pensiunan PNS Bakal Direvisi di 2024, Ini Bocorannya!* Retrieved from CNBC INDONESIA: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230523062307-4-439613/skema-pensiunan-pns-bakal-direvisi-di-2024-ini-bocorannya>
- Simanungkalit, J. H. (n.d.). STRUKTUR GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL : Upaya Pencapaian Keadilan Internal dan Eksternal PNS. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS*, 144-147.
- Suryanto. (2014, November). Sistem Pensiun PNS: Mewujudkan Sistem Pendanaan Pensiun Fully Funded. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS*, 8(2).
- The Association of Superannuation Funds of Australia Limited (ASFA). (2020, Juni). *The Benefits of Australia's Compulsory Superannuation System*.
- Wang, A. (2021). Australia's superannuation system explained. [https://www.sbs.com.au/language/english/en/article/australias-superannuation-system-explained/w1leh18x0?cid=alc:search:gg:en:ausedexplained:super:db&gad\\_source=1&gclid=CjwKCAjwupGyBhBBEiwA0Ucqan4QOs0Mdesht0D\\_CQS-CSiZuw595cIFbrZsR\\_EuXwi-cWehLeFChoCmcYQAvD\\_Bw](https://www.sbs.com.au/language/english/en/article/australias-superannuation-system-explained/w1leh18x0?cid=alc:search:gg:en:ausedexplained:super:db&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwupGyBhBBEiwA0Ucqan4QOs0Mdesht0D_CQS-CSiZuw595cIFbrZsR_EuXwi-cWehLeFChoCmcYQAvD_Bw)
- Wikipedia. (2024). *Australian Taxation Office*. [https://en.wikipedia.org/wiki/Australian\\_Taxation\\_Office](https://en.wikipedia.org/wiki/Australian_Taxation_Office)